

SEJARAH KONFLIK MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR

Helsa Tusni Yahya¹, M. Regi², Elya Roza³

helsatusniyahya@gmail.com¹, mregy@gmail.com², ellya.roza@uinsuska.ac.id³

UIN Suska Riau

ABSTRAK

Konflik yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu permasalahan kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara. Etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah menghadapi diskriminasi sistematis, penghilangan status kewarganegaraan, serta kekerasan berbasis etnis dan agama sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948. Kebijakan pemerintah yang eksklusif, propaganda militer, dan ketegangan sosial-ekonomi dengan mayoritas etnis Rakhine memperburuk kondisi mereka. Akibatnya, ribuan orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia, menghadapi perjalanan berbahaya dan kondisi hidup yang sulit. Tulisan ini menelusuri sejarah masuknya Islam ke Myanmar, perkembangan komunitas Rohingya, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini juga mengkaji peran Indonesia dan komunitas internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi terkait krisis pengungsi Rohingya. Metode historis dan pendekatan sosial digunakan untuk memahami akar konflik, mulai dari kebijakan pemerintah, peran militer, hingga dinamika interaksi antar-etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi sistematis, kekerasan militer, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi faktor utama yang memaksa Rohingya meninggalkan tanah kelahiran mereka. Resolusi konflik membutuhkan pendekatan multilateral, diplomasi kemanusiaan, serta kesadaran sejarah dan sosial yang mendalam untuk menjamin perlindungan hak dan keselamatan etnis Rohingya.

Kata Kunci: Rohingya, Konflik, Myanmar, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The conflict affecting the Rohingya ethnic group in Myanmar is one of the most complex humanitarian issues in Southeast Asia. The Rohingya, who are predominantly Muslim, have faced systematic discrimination, deprivation of citizenship, and ethnic and religious-based violence since Myanmar's independence in 1948. Exclusionary government policies, military propaganda, and socio-economic tensions with the Rakhine ethnic majority have exacerbated their situation. As a result, thousands of Rohingya have been forced to flee to neighboring countries such as Bangladesh and Indonesia, facing dangerous journeys and difficult living conditions. This paper traces the history of Islam's arrival in Myanmar, the development of the Rohingya community, and the social, economic, and psychological impacts of the protracted conflict. This research also examines the role of Indonesia and the international community in providing humanitarian assistance and diplomacy related to the Rohingya refugee crisis. Historical methods and social approaches are used to understand the roots of the conflict, from government policies and the role of the military to the dynamics of inter-ethnic interactions. The results show that systematic discrimination, military violence, and human rights violations are the main factors forcing the Rohingya to flee their homeland. Conflict resolution requires a multilateral approach, humanitarian diplomacy, and a deep historical and social awareness to ensure the protection of the rights and safety of the Rohingya ethnic group.

Keywords: Rohingya, Conflict, Myanmar, Human Rights.

PENDAHULUAN

Myanmar atau dikenal juga sebagai Burma adalah salah satu Negara di Asia Tenggara. Sampai saat ini Negara tersebut masih mengdapi konflik politik dan social di dalam negeri. Martin Smith seorang jurnalis, dokumentator dan penulis yang focus pada Myanmar pada tahun 1991 menyebut Negara ini sebagai tempat yang menakutkan akibat konflik yang berlangsung lama. Ia menulis bahwa kondisi di Burma saat itu berbeda secara signifikan dibandingkan banyak Negara lain, terutama karena adanya pengawasan dan sensor yang sangat ketat.

Myanmar terdiri atas tujuh negara bagian yang dinamai sesuai etnis minoritas yang mendiami wilayahnya. Negara ini terletak di Asia Tenggara dengan ibu kota di Yangon, serta berbatasan dengan Tiongkok, India, Laos, Thailand, dan Bangladesh. Myanmar memiliki lebih dari 135 kelompok etnis yang masing-masing memiliki budaya dan bahasa yang berbeda.

Rohingya adalah salah satu kelompok paling rentan di dunia. Mereka menghadapi masalah serius seperti tidak diakui kewarganegaraannya, diskriminasi, perlakuan tidak adil, pengucilan, hingga kekerasan. Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, komunitas ini mengalami penindasan besar-besaran melalui pembersihan etnis dan tindakan yang mengarah pada genosida. Sekitar 1,5 juta orang Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Konflik yang menimpa Rohingya di Myanmar juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan Asia Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 200Tenggara.

Siegfried O. Wolf mengungkapkan bahwa penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari kebijakan dan strategi pemerintah Myanmar sendiri. Pemerintah, khususnya junta militer, melihat komunitas Muslim Rohingya sebagai ancaman, baik secara sosial maupun politik. Mereka dianggap sebagai kelompok oposisi yang bisa mengganggu stabilitas dan dominasi kekuasaan yang ada. Dalam upaya mempertahankan kendali, junta militer diduga dengan sengaja membangkitkan kebencian masyarakat terhadap Rohingya. Strategi ini dijalankan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih besar, seperti tuntutan demokrasi, kebebasan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer. Saat masyarakat Myanmar mulai mendesak transparansi dan perubahan dari pemerintahan yang otoriter, militer justru menyebarkan narasi bahwa Rohingya adalah "penjajah baru" yang akan merebut sumber daya dan pekerjaan masyarakat local. Melalui propaganda ini, militer berusaha menciptakan musuh bersama di mata rakyat, yaitu Rohingya agar fokus dan kemarahan publik tidak lagi tertuju pada kebobrokan pemerintahan, melainkan dialihkan kepada kelompok yang sudah lama terpinggirkan. Ini bukan sekadar konflik antar-etnis, tapi juga bagian dari permainan kekuasaan yang kejam, dengan menjadikan Rohingya sebagai kambing hitam untuk menutupi kegagalan dan penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri.

Al-Maqdisi, seorang sejarawan Arab abad ke-10, mencatat adanya hubungan yang terjalin antara Burma, India, Kepulauan Melayu, dan Sri Lanka. Sejarah Burma menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Anawartha (1044–1077), orang-orang Arab berperan sebagai penunggang kuda bagi raja. Penganti Anawartha, Raja Sawlu (1077–1088), dididik oleh seorang guru Muslim keturunan Arab, dan Raja kemudian mengangkat putra guru tersebut, Yaman Khan, sebagai Gubernur kota Ussa (sekarang Pegu). Namun, akibat konspirasi di istana, Yaman Khan memberontak. Upaya untuk

menguasai Pagan berhasil digagalkan oleh Kyanzittha, saudara Raja Sawlu. Meski demikian, Raja Sawlu tetap mengizinkan berdirinya perkampungan Muslim di pedalaman Burma. Pada abad ke-13, di masa pemerintahan Raja Pagan Narathihpate (1255–1286), pasukan Kubilai Khan menyerang dan menduduki Nga Saung Chan. Di bawah komando Nasrudin, putra gubernur Yunnan, pasukan Kubilai Khan berhasil menguasai wilayah Burma, sehingga kehadiran komunitas Muslim di Burma kembali terasa signifikan.⁸

Mayoritas komunitas Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, pedagang, dan tentara, serta beberapa di antaranya berperan sebagai penasihat politik bagi Kerajaan Burma. Muslim Persia pertama kali datang ke Myanmar setelah menjelajahi wilayah selatan China, dan keberadaan koloni mereka tercatat dalam buku *Chronicles of China* pada tahun 860. Muslim asli Myanmar dikenal dengan sebutan Pathi, sedangkan Muslim keturunan China disebut Panthay, yang diyakini berasal dari kata Parsi. Seiring waktu, komunitas Muslim juga berkembang di wilayah Pegu, Tenasserim, dan Pathein. Selain itu, sebuah negara Islam didirikan di Arakan dengan bantuan Sultan Bengal yang beragama Islam, Naseeruddeen Mahmud Syah (1442–1459), yang membantu Raja Sulayman Naramitha dalam membangun negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.³ Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui teknik analisis isi (content analysis) guna memahami makna yang terkandung dalam teks dan literatur yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Islam di Myanmar

Islam sampai ke Myanmar atau yang dulu sebelum 1972 disebut Burma, melalui beberapa jalan. Pedagang Arab sudah mulai datang dan menetap di sepanjang garis pantai Myanmar selama abad 1 H (Abad VII M), atau sesudahnya.

Awalnya para pedagang Arab ini menempati wilayah di kawasan sekitar pantai Arakan, baru kemudian ke arah Selatan. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta Sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintharyi, dan Daerah Rakhin. Tahun-tahun berikutnya, para pedagang India dan Melayu telah efektif dalam menyebarkan Islam. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang China, Eropa, dan Persia.

Para pelaut Muslim telah datang ke Myanmar pada abad ke 9 M. Para pengelana dari China pada tahun 860 M menemukan daerah koloni Persia di perbatasan Yunnan. Seorang pelancong Persia, Ibnu Khordabheh, pelancong Arab abad IX, Sulaiman, dan pelancong Persia abad X, Ibnu Al-Faqih, dalam tulisan-tulisan mereka telah menyebut tentang daerah Burma Selatan.

Muslim Arab pertama kali datang pada sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan di wilayah arakan. Pada saat itu rempah-rempah, katun, batu mulia, barang tambang menjadi barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat timur tengah dan eropa. Kemudian kedatangan orang arab sebagai pendagang mampu hampir menguasainya. Melalui hubungan perdagangan tersebut orang muslim mulai memperkenalkan dan Menyebarluaskan agama Islam.

Dalam salah satu sejarah dijelaskan bahwa pada tahun 1406 raja Narameikhla atau raja penguasa arakan mengalami situasi yang sulit akibat adanya serangan dari raja Burma. Oleh karena itu untuk dapat mengatasinya maka sang raja hijrah dan meminta bantuan kepada sultan Nasiruddin shah yang ada di kesultanan Bengal. Setelah berjalannya waktu atau selama 24 tahun dalam buangan di Bengal. Raja mendapatkan bantuan tentara dari kesultanan dan mendapatkan kerajaannya kembali setelah dikuasai oleh kerajaan Burma. Akibat peristiwa tersebut menjadikan sang raja memeluk islam dan kemudian ia mengganti namanya menjadi Sulaiman Shah. Di tahun 1430 raja Narameikhla atau Sulaiman Shah mendirikan sebuah dinasti Mrauk U dan merupakan negara Islam pertama di Arakan.

Myanmar (dulu Burma) pada awalnya terbagi menjadi beberapa kerajaan. Hal ini menimbulkan beberapa versi mengenai kedatangan Islam khususnya di dua daerah bagian di Burma yakni, Pagan (Bagan) dan Arakan. Untuk mengetahui islamisasi di Myanmar perlu melihat pada proses islamisasi di kedua daerah tersebut.

Arakan sejak dahulu telah banyak dipadati oleh para pedagang Arab. Tempat ini terkenal di kalangan para pelaut Arab, Moor, Turki, Moghuls, Asia Tengah, dan Bengal. Mereka datang sebagai pedagang, prajurit dan ulama. Mereka menggunakan jalur darat dan laut. Pendatang tersebut banyak yang tinggal di Arakan dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Muslim Arab datang pertama kali pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pada waktu itu rempah-rempah, katun, batu mulia, barang tambang, dan komoditas lainnya merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Timur Tengah dan Eropa. Orang-orang Arab datang sebagai pedagang, dan hampir menguasai perdagangan tersebut. Melalui hubungan dagang tersebut, mereka mulai memperkenalkan dan menyebarkan Islam. Pengetahuan mereka tentang navigasi, ilmu garis lintang, dan garis bujur, fenomena astronomi, dan geografi negaranegara telah membuat mereka tak tertandingi dalam hal berdagang di Samudera Hindia selama beberapa abad. Orang-orang Arab tersebut menulis tentang tempat-tempat yang mereka datangi untuk membuktikan kedatangan mereka di dunia Timur dan Barat.

Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh tenggara.

Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmartak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke Negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di awah pengawasan PBB. Jadi, kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.

Pada masa kejayaan Kerajaan Arakan, yang berlangsung antara abad ke-16 hingga abad ke-18, pengaruh budaya Islam semakin kuat di wilayah tersebut melalui jalur perdagangan, hubungan politik, dan pernikahan antar kerajaan. Kerajaan Arakan memiliki relasi diplomatik yang erat dengan Kesultanan Bengal, yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga mendorong pertumbuhan pesat komunitas Muslim di Arakan. Menurut sejumlah sejarawan, termasuk Rashiduzzaman (1977), para pendatang Muslim dari Bengal dan India kemudian menetap dan berasimilasi dengan masyarakat setempat, membentuk identitas yang kini dikenal sebagai etnis Rohingya. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa pada masa itu banyak imigran Muslim dari Bengal dan wilayah sekitarnya membawa serta ajaran agama dan unsur kebudayaan mereka, yang kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Arakan.

Bangladesh merupakan negara terdekat dengan Myanmar, namun bersikap tegas menolak kedatangan pengungsi Rohingya dengan alasan kepadatan penduduk yang sudah tinggi (overpopulation). Penolakan tersebut juga tampak ketika pemerintah Bangladesh tidak mengizinkan bantuan asing untuk membangun kamp penampungan di wilayah perbatasannya. Sejak tahun 1978, tercatat sekitar 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, kemudian pada periode 1991–1992 jumlah pengungsi bertambah sekitar 10.000 orang, dan pada tahun 1992 meningkat drastis hingga mencapai 270.000 orang yang mengungsi ke negara tersebut (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people). Gelombang besar pengungsian ini terjadi akibat berbagai tindakan kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, yang memaksa mereka mencari perlindungan ke negara lain.

Penderitaan yang dialami etnis Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar, telah menarik perhatian dunia internasional, termasuk pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari implementasi politik luar negeri. Ada dua alasan utama yang melatarbelakangi keterlibatan Indonesia dalam isu ini. Pertama, sebagian pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar terdampar di wilayah Indonesia setelah menyeberangi lautan. Kedua, mayoritas dari mereka beragama Islam, sehingga menimbulkan rasa solidaritas kemanusiaan dan keagamaan dari masyarakat Indonesia. Karena itu, penting untuk memahami langkah nyata pemerintah Indonesia, baik dalam penanganan pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia maupun melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan terhadap mereka yang masih berada di Rakhine, dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.

Meski demikian, pada awal krisis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat menuduh Indonesia, Thailand, dan Malaysia mengabaikan seruan untuk memberikan izin bagi ribuan migran yang terkatung di laut agar dapat mendarat. Para pengungsi tersebut terdampar setelah jaringan penyelundupan manusia terungkap dan ditindak oleh otoritas Thailand, menyebabkan para penyelundup meninggalkan mereka di tengah laut. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Pravit Wongsuwan, menegaskan bahwa kapal-kapal imigran tidak boleh memasuki wilayah negaranya tanpa izin resmi. Sementara itu, Indonesia juga mengambil langkah antisipatif dengan menyiagakan pasukan TNI Angkatan Laut, termasuk empat kapal perang (KRI) dan satu pesawat Casa, untuk mencegah masuknya pengungsi tanpa dokumen ke wilayah Indonesia.

Kondisi Penduduk Myanmar (Muslim Rohingya)

Masyarakat Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan berasal dari negara bagian Rakhine, Myanmar, yang terletak di sepanjang pantai barat negara tersebut, berbatasan dengan Bangladesh. Mereka telah lama mereka menjadi

korban penindasan dan diskriminasi, baik dari pihak pemerintah Myanmar maupun dari sebagian besar masyarakat Buddha di negara tersebut. Secara historis, komunitas Rohingya telah menetap di wilayah itu selama berabad-abad, jauh sebelum kawasan tersebut menjadi bagian dari Myanmar modern. Sebagai kelompok Muslim, Rohingya memiliki keterkaitan sejarah dengan berbagai kerajaan dan kesultanan Islam yang pernah berdiri di daerah tersebut, termasuk Kesultanan Arakan yang muncul pada abad ke-15 Masehi.

Pada abad ke-20, setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, ketegangan antara mayoritas etnis Rakhine (Budha) dan minoritas Rohingya semakin meningkat. Ketegangan ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah Myanmar yang mengabaikan hak-hak etnis Rohingya, serta kebijakan segregasi yang membatasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. (Wicaksono Agung, 2018).

Selama beberapa dekade, etnis Rohingya telah menjadi korban berbagai kebijakan diskriminatif yang semakin parah sejak tahun 2012, ketika terjadi kekerasan sektarian antara komunitas Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Puncaknya terjadi pada tahun 2017, ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran yang, menurut berbagai laporan dari PBB dan lembaga hak asasi manusia, dikategorikan sebagai tindakan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Akibat operasi tersebut, ribuan orang kehilangan nyawa, dan lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, memunculkan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia.¹⁹

Pemerintah Myanmar menolak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan bagian dari etnis asli yang telah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan tahun 1948. Pandangan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Thein Sein pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa Myanmar tidak akan memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya karena mereka dianggap sebagai imigran ilegal dan pelintas batas dari Bangladesh. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, hanya etnis yang telah menetap di wilayah Myanmar sebelum masa penjajahan Inggris tahun 1824 yang diakui sebagai warga negara sah. Tercatat terdapat 135 kelompok etnis yang diakui, namun etnis Rohingya yang dikategorikan sebagai etnis Bengali tidak termasuk di dalamnya (Arianta dkk., 2020). Konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh keragaman etnis semata, tetapi juga oleh ketimpangan ekonomi, perbedaan agama, rasa superioritas etnis tertentu, serta kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif dengan memberikan hak istimewa kepada kelompok etnis tertentu (Sigit & Novianti, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana sejarah terjadinya konflik etnis Rohingya serta apa saja dampak yang ditimbulkannya.²⁰

Diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya bersifat mendunia karena mereka tidak diakui kewarganegaraannya, bahkan tidak termasuk dalam daftar 135 etnis resmi yang diakui oleh Myanmar berdasarkan amandemen Konstitusi tahun 1982. Konflik di Myanmar terus berlanjut karena pihak pemerintah Burma tidak menganggap Rohingya sebagai bagian dari kelompok etnis nasional. Pada tahun 2011, Presiden Thein Sein secara terbuka menyatakan bahwa “Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.” Ia bahkan mengusulkan agar PBB melalui UNHCR mengambil alih penanganan pengungsi Rohingya atau menempatkan mereka di negara ketiga. Akibatnya, etnis Rohingya terus menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri, seperti tidak diakuinya status kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari pekerjaan, perampasan properti, kerja paksa, pembunuhan, pemerkosaan terhadap

perempuan Rohingya, serta pembakaran rumah dan tempat ibadah mereka.

Tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memberikan dampak mendalam terhadap kondisi psikologis mereka, terutama pada anak-anak. Anak-anak tumbuh dalam rasa takut dan ketidaknyamanan, yang menghambat kemampuan mereka untuk beraktivitas secara normal. Tidak hanya itu, para orang tua pun menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena pemerintah Myanmar membatasi bahkan mengatur secara ketat akses mereka terhadap pekerjaan maupun aktivitas ekonomi. Situasi ini menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan di tanah kelahiran mereka sendiri, sehingga banyak yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Myanmar. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Rohingya tetap bertahan di Rakhine walaupun hidup dalam ancaman dan tanpa pengakuan resmi. Alasan utama mereka bertahan adalah karena menganggap Rakhine sebagai tanah leluhur yang telah mereka tempati selama berabad-abad. Selain itu, beberapa warga Rohingya pernah berperan aktif dalam politik Myanmar. Sementara itu, bagi sebagian lainnya, upaya untuk mengungsi ke daerah lain terkendala oleh terbatasnya akses dan sarana transportasi yang sulit dijangkau.

Salah satu negara yang menjadi tempat tujuan utama etnis Rohingya bermigrasi adalah Bangladesh, hal ini dikarenakan Bangladesh memiliki kesamaan budaya dan fisik dengan masyarakat etnis Rohingya. Perpindahan masyarakat etnis Rohingya ke Bangladesh terjadi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai sejak tahun 1948 ketika Myanmar merdeka. Periode kedua terjadi pada tahun 1978 ketika terjadi represi Negara kurang lebih 200 ribu masyarakat etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Periode ketiga terjadi pada tahun 1991/1992 di mana pada saat itu terdapat 250 ribu masyarakat etnis Rohingya bermigrasi ke Bangladesh. Pada awalnya pemerintah Bangladesh menganggap masyarakat etnis Rohingya tersebut sebagai migrasi yang mencari suaka, namun ketika jumlahnya semakin besar pemerintah Bangladesh mulai menganggap masyarakat etnis Rohingya yang datang ke Bangladesh tersebut sebagai pengungsi yang kemudian ditampung di tenda-tenda pengungsi (Alfiyah 2018: 48).

Selain negara Bangladesh, negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang dijadikan tempat pelarian masyarakat etnis Rohingya yang merasa tidak mampu bertahan di negara asalnya yakni Myanmar. Di tahun 2016, SUAKA melaporkan bahwa terdapat sekitar 2041 pengungsi Rohingya di Makassar dan di tahun 2023 Indonesia kembali didatangi oleh pengungsi Rohingya dari Myanmar dengan jumlah yang cukup banyak. Pemerintah negara Indonesia sendiri telah berupaya memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya, meskipun dalam pelaksanaannya tersebut pemerintah Indonesia juga banyak mengalami kendala. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragamakan Islam terbesar di dunia tentu memiliki peran yang penting dalam merespon pelanggaran HAM di Myanmar (Wahyudi and Niko 2023: 112).

Konflik Muslim di Myanmar

Konflik internal antara pemerintah Myanmar dan suku Muslim Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan dalam sejarah modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut etnis Rohingya sebagai kelompok etnis paling tertindas di dunia. Berdasarkan laporan dari Médecins Sans Frontières (MSF), sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang beranggotakan para dokter lintas batas, tercatat bahwa pada tahun 2017 saja sekitar 647.000 orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh demi menyelamatkan diri dari kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dari 6.700 yang meninggal, 69,4% meninggal karena ditembak, 8,8%

meninggal karena dibakar, 5% meninggal karena dipukuli, 2,6% meninggal setelah kekerasan seksual, dan sisanya ada yang meninggal karena disembelih lehernya dan diculik (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386>). Secara lengkap ditunjukkan table berikut pada rentang waktu dari tahun 1991 hingga tahun 2019.²⁴

Table 1. Data Korban Persekusi Pemerintah Myanmar terhadap Suku Rohingya.

Tahun	Status	Jumlah Orang
1991-1992	Melarikan Diri dari Myanmar	260.000
2001	Tewas	10
2008-2009	Mengungsi dengan Tujuan Thailand	6.000
2012	Tewas	410
	Mengungsi	140.000
2014	Tewas	200
	Mengungsi	87.000
2015	Diduga kuburansu Suku Rohingya	139
	Mengungsi	143.500
2016	Tewas	1.100
	Mengungsi	230.000
2017	Tewas	10.000
	Mengungsi	620.000
2018	Mengungsi	1.431.816
2019	Mengungsi	1.534.500

Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuhan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuhan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini.²⁵

Penderitaan etnis Rohingya tidak hanya terjadi di tanah kelahirannya, tetapi juga berlanjut saat mereka berusaha meninggalkan Myanmar demi mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih layak. Harapan akan masa depan yang lebih baik mendorong mereka, bersama sebagian warga Bangladesh, membayar sejumlah uang agar bisa keluar dari negaranya meski harus diselundupkan. Namun, perjalanan itu sering berakhir tragis. Ketatnya pengawasan Angkatan Laut Malaysia dan Thailand membuat banyak kapal pengungsi terkatung di laut hingga 40 hari tanpa arah dan kepastian. Dalam kondisi itu, mereka rentan mengalami kelaparan, penyakit, dan kekerasan seksual. Sebagian besar pengungsi meninggalkan Myanmar karena tidak diakui sebagai warga negara, sehingga tak memiliki tujuan jelas selain keluar dari wilayah penindasan. Sebagian akhirnya terdampar di Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh Timur, dan mendapat pertolongan dari nelayan setempat. Banyak di antara mereka bersedia ditempatkan di negara mana pun asalkan bisa hidup aman.

Selama pelarian, para pengungsi mengalami penderitaan berat. Mereka meminum air laut untuk bertahan hidup karena kehabisan makanan dan bahan bakar, bahkan memakai terpal plastik sebagai layar darurat. Ada yang terapung hingga empat bulan, setelah tentara Thailand menolak menampung dan meninggalkan mereka di laut lepas. Tak jarang, korban

yang meninggal dibuang ke laut akibat sempitnya perahu dan banyaknya penumpang. Perjalanan berbahaya ini difasilitasi oleh penyelundup yang meminta bayaran sekitar 20.000 kyat (sekitar Rp240.000) dengan janji pekerjaan di Malaysia atau Thailand. Namun kenyataannya, mereka terkatung di laut hingga diselamatkan nelayan Aceh. Warga Rohingya lebih memilih meninggalkan Myanmar karena diskriminasi yang parah: dilarang memiliki telepon seluler dan bisa dipenjara atau didenda bila ketahuan. Untuk bebas dari penjara, mereka bahkan harus membayar hingga Rp40 juta, mencerminkan betapa kejamnya perlakuan yang mereka alami.

Dalam kategori “Kekerasan Antar Agama”, Eramuslim.com menilai bahwa peristiwa di Myanmar merupakan bentuk pembantaian dan kekerasan berlatar belakang agama, khususnya antara Islam dan Buddha, di mana umat Islam menjadi pihak yang tertindas. Menurut mereka, konflik ini dipicu oleh penanganan aparat yang buruk terhadap kasus kriminal yang terjadi sebelum bentrokan pecah. Sementara itu, Republika memandang kejadian tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang terorganisir disertai tindakan anarkistik. Faktor pemicunya dianggap berasal dari ketidakjelasan informasi yang beredar di masyarakat. Sedangkan Sabili menyoroti peristiwa tersebut sebagai bentuk penindasan terhadap umat Muslim oleh berbagai pihak. Mereka menilai konflik ini dipicu oleh perbedaan agama, etnis, serta kesenjangan ekonomi yang memperdalam ketegangan sosial di Myanmar.²⁷

Peran Indonesia dapat berjalan secara optimal apabila mencakup upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak-pihak yang disetujui oleh pemerintah Myanmar. Hal ini terlihat, misalnya, melalui keterlibatan Indonesia dalam mengangkat isu Rohingya pada Forum Menteri Luar Negeri ASEAN serta partisipasi kelompok masyarakat sipil berbasis keagamaan dari Indonesia yang berupaya membangun perdamaian di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaan strategi penyelesaian konflik baik jangka pendek (short-term solutions) maupun jangka panjang (long-term solutions), penting untuk memahami bahwa setiap konflik memiliki tahapan-tahapan tertentu yang masing-masing menghadirkan tantangan berbeda. Tahapan-tahapan inilah yang dapat dikaitkan dengan dinamika konflik dan pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Tabel 2. Mitigasi Upaya Diplomasi yang dapat dilakukan Indonesia Terkait Isu Rohingya (Diolah oleh Penulis, 2023).

Posisi Strategis Indonesia	Strategi Penyelesaian Konflik
Indonesia dapat memanfaatkan komisi HAM yang bernaung dibawah organisasi ASEAN yakni AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) yang telah disetujui oleh kesepuluh negara ASEAN pada tahun 2003 sebagai jenjang untuk menjaga ASEAN Political Community yang dibentuk pada tahun 2015.	Menggerakkan kerjasama multilateral dengan pihak lain atas nama kemanusiaan (humanitarian), seperti Tripartite Core Group (TCG) yang melibatkan PBB, ASEAN, dan Myanmar.
Indonesia dapat juga memanfaatkan Forum Menteri Luar Negeri ASEAN yang memang sudah dijalankan oleh Indonesia dalam menanggapi masalah HAM Rohingya sejak 2008.	Melibatkan kelompok civil society keagamaan yang ada di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah.

Konflik etnis Rohingya merupakan konflik yang berlangsung lama dan memiliki dampak luas, tidak hanya dalam ranah horizontal antarkelompok masyarakat, tetapi juga secara vertikal antara rakyat dan pemerintah. Perselisihan ini telah berkembang dari sekadar konflik antaretnis menjadi pertentangan antara etnis Rohingya dan pemerintah yang berkuasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik telah mencapai titik puncaknya, yaitu pada tahap hurtig stalemate, di mana kedua pihak yang bertikai sama-sama mengalami kerugian besar. Bahkan, situasi ini telah meluas hingga mengancam stabilitas kawasan regional. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dari para pembangun perdamaian (peace builder) untuk menentukan pada tahap mana proses perdamaian dapat mulai diwujudkan.

KESIMPULAN

Konflik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan hasil dari kombinasi sejarah panjang, diskriminasi sistematis, dan kebijakan pemerintah yang bersifat eksklusif. Sejak masuknya komunitas Muslim ke wilayah Myanmar melalui jalur perdagangan, terutama di Arakan, Rohingya telah membentuk identitas sosial, budaya, dan agama yang kuat. Namun, sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, mereka menghadapi penindasan, pengucilan, dan pembatasan hak-hak dasar, termasuk pengakuan kewarganegaraan, akses pekerjaan, dan properti.

Ketegangan etnis dan agama yang diperburuk oleh kebijakan pemerintah serta propaganda militer menyebabkan terjadinya kekerasan masif, pembersihan etnis, dan krisis pengungsi. Ribuan warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia, menghadapi perjalanan berbahaya serta ancaman kelaparan, penyakit, dan kekerasan selama migrasi. Anak-anak dan keluarga Rohingya secara psikologis juga mengalami dampak yang signifikan akibat kekerasan yang berlangsung lama.

Peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menunjukkan pentingnya diplomasi kemanusiaan dan bantuan pengungsi. Melalui forum ASEAN dan kerja sama multilateral, Indonesia berupaya menanggapi isu Rohingya baik di dalam negeri maupun melalui diplomasi internasional.

Secara keseluruhan, konflik Rohingya bukan hanya sekadar perselisihan etnis atau agama, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural, penguasaan kekuasaan, dan kegagalan sistem pemerintah dalam melindungi kelompok minoritas. Penanganan masalah ini membutuhkan upaya jangka panjang, kerja sama regional, dan komitmen internasional untuk menjamin hak-hak dasar, keamanan, dan kesejahteraan etnis Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- Af'aliyah, Khoirotul. "Proses Islamisasi Myanmar: Studi pada Etnis Rohingya." *Jurnal Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 1, No. 6, 2020, hlm. 265.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Amzah, 2018.
- Azhari, Yulian, dkk. "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Lokal Indonesia." *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 478.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Dewi Septia, Rafika, dkk. "Problematika Kehidupan Muslim Minoritas di Asia Tenggara (Muslim Melayu Pattani, Muslim Moro, dan Muslim Rohingya)." *Ghaitsa Islamic Education Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 66.

- Hartati, Anna Yulia. "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 8–11.
- Hartono, Mudji, dkk. "Islam Menghadapi Junta Militer di Myanmar." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Myanmar*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 2–3.
- Helmiati, Dr. Hj., M.Ag. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: CV Nuansa Jaya Mandiri, 2014.
- Rosyid, Mohammad. "Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 3, 2019, hlm. 614–615.
- Ruslan, dkk. "Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 559–600.
- Sebastian, Anggi Septa, dkk. "Konflik Muslim Rohingya dalam Bingkai Tiga Media Islam di Indonesia." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, 2013, hlm. 181.
- Siba, M. Angela Merici, dkk. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya (Human Right Violations on Rohingya Conflict)." *Jurnal Islamic World and Politic*, Vol. 2, No. 2, Juli–Desember 2018, hlm. 376.
- Sriliza, dkk. "Sejarah Muslim Rohingya." *Jurnal Teologi & Tafsir*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Sundari, Rio, dkk. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar." *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 178.
- Susanti, Endang, dkk. "Kosmopolitanisme Vernakular: Respon Indonesia terhadap Konflik Rohingya di Myanmar." *Jurnal SMaRT*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 284.
- Thontowi, Jawahir. "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional." *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 45.
- Wahyudi, Herry, dkk. "Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Myanmar." *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 117–118.
- Wasalmi. "Sejarah Konflik Muslim Rohingya." *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 200.
- Wulandari, Veronika. "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 53.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.